

## **PERSEPSI WAJIB PAJAK DAN PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT DENGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG BARAT**

**Sri Suyati**

**Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang**

Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang Telp 024 8316187, Fax 024 8316193

*suyatismg@gmail.com*

### **Abtrak**

*Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara (Budgetair) dan alat pengatur Negara (Reguler). Terdapat perbedaan prinsip antara system perpajakan sebelum taxreform dengan system perpajakan sekarang. Hal tersebut disebabkan diubahnya Sistem Official Assessment dengan Sistem Self Assessment. Melalui pelaksanaan system Self Assessment diharapkan administasi perpajak dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak dan Pelaksanaan system Self Assessment dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak perseorangan pada Kantor Pelayanan pajak Semarang Barat. Populasi yang dijadikan obyek adalah seluruh Wajib Pajak Perseorangan yaitu sebesar 11.139 Orang (per Maret 2012). Jumlah sampel yang diambil sebesar 100 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah cara undian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas korelasi Rank Spearman, korelasi Kendall W dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :*

- 1. Terdapat hubungan yang positif antara Persepsi Wajib Pajak (X1) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)*
- 2. Terdapat hubungan yang positif antara Pelaksanaan Sistem Self Assessment (X2) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)*
- 3. Terdapat hubungan yang positif antara Persepsi Wajib Pajak (X1) dan Pelaksanaan Sistem Self Assessment (X2) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)*

*Kata Kunci : Persepsi Wajib Pajak, System Self Assessment, Kepatuhan*

### **Abstract**

*The main function is as a source of finance tax state (budgetair) and State regulating device (Regular). There is a difference in principle between the taxation system before taxreform the current taxation system. This was due transforms official Assessment System with Self Assessment System. Through the implementation of the Self Assessment system is expected to be implemented by the administration perpajak more orderly, controlled, simple and easily understood by members of the public taxpayer The purpose of this research was to determine the perception and implementation Taxpayer Self Assessment system to the level of individual taxpayer compliance in West Semarang Tax Service Office .. Population is used as the object of all Individual Taxpayer is equal 11,139 people (as of March 2012). Samples are taken by 100 people. The sampling technique used is random sampling. The method used for sampling is a way of lottery. Analysis tools used in this research is to test the validity of*

*the Spearman rank correlation, correlation Kendall W and hypothesis testing* Based on the research and discussion of issues that have been done can be summed up as follows:

1. *There is a positive relationship between the perception of the taxpayer (X1) with an Individual Taxpayer compliance rate (Y)*
2. *There is a positive relationship between the implementation of Self Assessment System (X2) with an Individual Taxpayer compliance rate (Y)*
3. *There is a positive relationship between the perception of the taxpayer (X1) and Implementation of Self Assessment System (X2) with an Individual Taxpayer compliance rate (Y)*

*Keywords: Taxpayers Perception, Self Assessment System, Compliance*

## **Latar Belakang**

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Nasional memerlukan investasi dalam jumlah besar, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan Negara yang utama. Namun mengingat penerimaan Negara dari minyak bumi dan gas alam sudah tidak stabil, maka pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan Negara dari sector lain yaitu sektor pajak.

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan alat pengatur negara (*Reguler*). Fungsi budgetair adalah pajak yang berfungsi sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi regular yaitu pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan fungsi pajak di Indonesia banyak diarahkan untuk pelayanan ekonomi guna mendorong kegiatan ekonomi masyarakat serta ditunjukkan sebagai alat redistribusi pendapatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 1983 pemerintah melakukan pembaharuan system perpajakan nasional. Langkah kearah itu yang paling penting adalah diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang lebih dikenal dengan reformasi perpajakan (*Tax Reform*). Pembahasan mengenai peraturan tersebut menghasilkan lima undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2003:13).

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan atas Barang Mewah, diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Selanjutnya Tahun 2000 dihasilkan undang-undang perpajakan sebagai perubahan undang-undang perpajakan yang lama yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997
- e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997

Terdapat perbedaan prinsip antara system perpajakan sebelum taxreform dengan system perpajakan sekarang. Hal tersebut disebabkan diubahnya *Sistem Afficial Assessment* dengan *Sistem Self Assessment*. *Sistem Afficial Assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini aparat pajak (fiskus). Sedangkan dalam sistem *Self Assessment* anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Melalui pelaksanaan sistem *Self Assessment* diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi,terkendali,seederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Sistem *Self Assessment* diterapkan karena perpajakan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam Sistem *Self Assessment* masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga system *Self Assessment* juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap jaminan dan hukum mengenai hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak, sehingga melalui *Self Assessment* diharapkan dapat merangsang meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan bagi Wajib Pajak.

Setiap wajib Pajak mempunyai factor tertentu dalam membayarkan pajak alas an tersebut hendaknya diketahui Kantor Pelayanan Pajak, sehingga Kantor Pelayanan Pajak dapat mengetahui bagaimana tingkat Kepatuhan Wajib Pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu orientasi Kantor Pelayanan Pajak yang sangat diperlukan untuk menunjang penerimaan Negara khususnya dari sector pajak yang optimal. Tingkat kepatuhan Wajib pajak ini dapat diketahui dari tingkat ketepatan penghitungan, penyeteroran maupun pelaporannya.

Dengan tingkat kepatuhan yang baik diharapkan Wajib Pajak dapat menghitung, menyeteror dan melaporkannya pajak yang seharusnya sesuai dengan keadaan yang ada sehingga pada akhirnya penerimaan akan meningkat.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Bagaimana persepsi wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak perseorang pada kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat ?
2. Bagaimana pelaksanaan system *Self Assessment* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak perseorang pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat ?
3. Bagaimana persepsi wajib pajak dan pelaksanaan system *Self Assessment* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak perseorang pada kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak perseorang pada kantor Pelayanan pajak Semarang Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan system *SelfAssessment* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak perseorangan pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat ?
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak dan pelaksanaan system *SelfAssessment* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak perseorangan pada kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat

### **Manfaat Hasil Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada aparat perpajakan dalam hal ini Kantor Pelayanan pajak Semarang Barat, mengenai persepsi wajib pajak perseorangan dan pelaksanaan system *Self Assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta kesadaran akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan Negara
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat dalam masalah serupa
3. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak perseorangan dalam arti pentingnya membayar pajak

### **Metodologi Penelitian**

#### **Populasi dan sampel**

Populasi yang dijadikan obyek adalah seluruh Wajib Pajak Perseorangan yaitu sebesar 11.139 Orang (per Maret 2012).Jumlah sampel yang diambil sebesar 100 orang

#### **Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 2 macam data (Husein Umar, 1999:43)

##### 1. Data Primer

Adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. Data primer yang diperoleh adalah data yang diperoleh dari tanggapan responden. Dalam usaha memperoleh data primer metode yang digunakan adalah :

###### a. Kuesioner

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab

###### b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian

##### 2. Data Sekunder

Adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri penelitian sendiri, walupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Data sekunder diperoleh dai majalah, brosur perusahaan dan literature ilmiah

#### **Metode Analisa Data**

Untuk menganalisis data-data yang ada sehingga memberikan kesimpulan yang dibutuhkan, maka ada beberapa alat analisa yang digunakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Analisis Deskriptif

Adalah analisis yang bertujuan untuk menyajikan data atau hasil pengamatan secara singkat dan jelas, yang meliputi penyajian data dalam bentuk table, grafik diagram dan ukuran asosiasi. Sebelum

data diolah lebih lanjut, perlu dilakukan pengorganisasian data yang meliputi :

a. Editing

yaitu proses yang dilakukan setelah data terkumpul untuk melihat apakah jawaban pada kuesioner telah terisi dengan lengkap atau belum

b. Coding

Yaitu proses pemberian kode tertentu terhadap macam jawaban dari kuesioner untuk dikelompokkan ke dalam katagori yang sama

c. Pemberian Score atau nilai

Didalam pemberian score atau penilaian ini digunakan skala likert yang merupakan salah satu cara untuk menentukan score. Kreteria penilaian ini digolongkan dalam 4 tingkatan dengan penilaian sebagai berikut :

- Untuk jawaban a diberi nilai 4
- Untuk jawaban b diberi nilai 3
- Untuk jawaban c diberi nilai 2
- Untuk jawaban d diberi nilai 1

d. Tabulasi

Yaitu pengelompokan tes jawaban dengan teliti yang terarah kemudian dihitung dan dijumlah sampai terwujud kedalam bentuk tabel

2. Analisis Inferensial

Adalah analisis yang bertujuan untuk melakukan generalisasi yang meliputi estimasi (perkiraan) dan penyajian hipotesis berdasarkan suatu data atau sampel

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Validitas

Indikator yang digunakan diuji kevalidannya dengan menggunakan korelasi Product Moment Pearson yang rumusnya sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{(n(\sum X^2) - (\sum X)^2) (n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

X = Score indicator empiris yang diuji

Y = Total score indicator empiris dalam konsep yang sama

r = Koefisien korelasi antar indicator

Kreteria pengujian

- r hitung > r table maka indicator dinyatakan Valid

- r hitung < r table maka indicator dinyatakan Tidak Valid

2. Pengujian Reliabilitas

Pengujian ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menguji samapai sejauh mana pengukuran hasil yang relative tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Dalam penelitian ini dilakukan uji reliabilitas (koefisien cronvach alpha) dengan rumus sebagai berikut (Burhan Nurgiyantoro : 2000,310)

$$R = \left[ \frac{K}{(K-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \delta_b^2}{\delta_t^2} \right]$$

Keterangan :

r = reliabilitas instrument

K = banyaknya butir pertanyaan

$\sum \delta_b^2$  = jumlah varians butir

$\delta_r^2$  = varians total

### 3. Korelasi Rank Spearman

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variable x dan y maka digunakan rumus Korelasi Rank Spearman dengan rumus sebagai berikut : (Sidney Siegel, 1997;256)

$$r = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana dengan menggunakan koefisien korelasi rank Spearman ini digunakan pertolongan

Rx = Rank dari X

n = Banyaknya Data

Ry = Rank dari Y

d = Ry - Rx

### 4. Korelasi Konkordansi Kendall W

Digunakan untuk mengukur derajat hubungan (korelasi) antara beberapa variable yang diamati (Samsubar Saleh 1996,114). Untuk menghitung nilai statistik korelasi konkordansi Kendall W, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

a. Menjumlahkan ranking pada tiap obyeknya (R)

b. Selanjutnya kita jumlahkan R tersebut, kemudian bagilah dengan N untuk memperoleh nilai mean (rata-rata)

$$R \rightarrow \frac{(\sum R)}{N}$$

c. Setiap R, selanjutnya dapat dieksperimenkan sebagai deviasi (S) terhadap nilai mean (R) yang telah diperoleh. Dari langkah diatas maka W dapat

$$W = \frac{S}{1/12 \cdot k^2 (N^3 - N)} \quad S = \sum (R - \frac{(\sum R)}{N})^2$$

Diformulasikan sebagai berikut :

Keterangan :

S = Menunjukkan jumlah deviasi kuadrat

K = Jumlah set rangking

N = Jumlah obyek yang akan diamati/yang di nilai

$1/12 \cdot k^2 (N^3 - N)$  = Jumlah maksimum deviasi kuadrat yang dapat diperoleh pada sejumlah set rangkingnya

Interpretasi dari hasil runusab konstan adalah sebagai berikut :

Besarnya nilai r	Interpretasi
Antara 0,800-1,000	Sangat kuat
Antara 0,600-0,799	Kuat
Antara 0,400-0,599	Cukup
Antara 0,200-0,399	Rendah
Antara 0,000-0,199	Sangat rendah

Sumber : Suharsimi Arikunto, 1998:260

## 5. Pengujian Hipotesis

### a. Korelasi Rank Spearman

- Ho : =0 (tidak ada hubungan positif yang signifikan antara X dengan Y)

- Ha : >0 (ada hubungan positif yang signifikan antara X dengan Y)

Statistik Uji :

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

r = Koefisien korelasi variable yang diukur

Kriteria pengujian

- Taraf nyata 0,05
- Derajat kebebasan n-2
- Jika t hitung > t table, maka Ho ditolak dan Ha diterima
- Jika t hitung < t table, maka Ho diterima dan Ha ditolak
- Gambar 3.1 Tes signifikansi t hitung

### b. Korelasi Rank Korelasi Konkordansi Kendall W

- Ho : =0 tidak terdapat korelasi/kesesuaian antara X1 dan X2 dengan Y

- Ha : >0 terdapat korelasi/kesesuaian antara X1 dan X2 dengan Y

Statistik Uji :

$$X^2 - k(N-1)w$$

Dimana :

W = Koefisien korelasi Konkordansi Kendall W

k = Banyaknya variable bebas

N = banyaknya sampel

Kriteria Pengujian :

- Taraf nyata 0,05
- Derajat kebebasan n-1
- $X^2$  hitung >  $X^2$  tabel maka Ha diterima
- $X^2$  hitung <  $X^2$  tabel maka Ha ditolak

**Tabel 1**  
**Pembahasan Hasil Penelitian dan Hasil Perhitungan Validitas Indikator**

Variabel dengan indikatornya	r hitung	>/<	r tabel	Keterangan
Pers Wajib Pajak (X1)				
X1.1	0,524	>	0,195	
Valid				
X1.2	0,593	>	0,195	
Valid				
X1.3	0,697	>	0,195	
Valid				
X1.4	0,695	>	0,195	
Valid				
X1.5	0,632	>	0,195	
Valid				
Pelaksanaan Sistem Self Assesmen (X2)				
X2.1	0,645	>	0,195	
Valid				
X2.2	0,675	>	0,195	
Valid				
X2.3	0,620	>	0,195	
Valid				
X2.4	0,638	>	0,195	
Valid				
X2.5	0,557	>	0,195	
Valid				
Tingkat Kepatuhan WP Perseorangan				
Y1	0,607	>	0,195	
Valid				
Y2	0,330	>	0,195	
Valid				
Y3	0,501	>	0,195	
Valid				
Y4	0,640	>	0,195	
Valid				
Y5	0,675	>	0,195	
Valid				

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari tabel dapat diketahui bahwa keseluruhan indicator mempunyai r hitung yang lebih besar dari pada r tabel (0,195) sehingga dapat dikatakan keseluruhan indicator valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat reliabel alat ukur dengan menggunakan rumus alpha cronbach. Dari uji reliabilitas diperoleh sebagai berikut ( lampiran 3)

**Tabel 2**  
**Hasil Perhitungan Reliabilitas**

Variabel	Koefisien	Keterangan
Persepsi Wajib Pajak (X1)	0,7483	Reliabel
Pelaksanaan Sistem Self Assessment (X2)	0,7468	Reliabel
Tingkat Kepatuhan WP Perseorangan (Y)	0,6997	Reliabel

Sumber Data Primer yang diolah



Dari tabel dapat diketahui bahwa keseluruhan variable diatas 0,60 (Burhan Nurgiyantoro, 2000) sehingga Persepsi Wajib Pajak (X1), Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* (X2) dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y). adalah reliable. Hal ini berarti keseluruhan variable dapat dipercaya atau masih dapat diandalkan digunakan dalam penelitian Persepsi Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dengan tingkat kepatuhan Wajib pajak perseorangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat.

### **Analisis Inferensial**

#### **Analisis Korelasi Rank Spearman**

Analisis Korelasi Anantara Persepsi Wajib Pajak (X1), Pelaksanaan Sistem Self Assessment (X2) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y).

1. Analisis korelasi antara Persepsi wajib Pajak (X1) dengan Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Perseorangan (Y) adalah sebesar  $r_{X1Y} = 0,987$  (hasil perhitungan lampiran 5). Hal ini berarti antara Persepsi Wajib Pajak (X1) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) ada hubungan positif yang signifikan dengan keeratan hubungan yang sangat kuat, dengan demikian semakin baik Persepsi Wajib Pajak (X1) maka semakin meningkat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat.
2. Analisis korelasi antara Pelaksanaan Sistem Self Assessment (X2) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) adalah sebesar  $r_{X2Y} = 0,976$  (hasil perhitungan lampiran 5), hal ini berarti antara Pelaksanaan Sistem Self Assessment (X2) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) ada hubungan positif yang signifikan dengan keeratan hubungan yang sangat kuat, dengan demikian semakin baik pelaksanaan system self assessment (X2) yang diberikan maka semakin meningkat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat.

#### **Analisis Korelasi Kendall W**

Analisis korelasi antara Persepsi wajib Pajak (X1) dan Pelaksanaan system Self Assessment (X2) dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) adalah W sebesar 0,872 (hasil perhitungan lampiran 5) Hal ini berarti antara Persepsi wajib Pajak (X1) dan Pelaksanaan Sistem Self Assessment (X2) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) ada hubungan positif yang signifikan dengan keeratan hubungan yang sangat kuat, Dengan demikian semakin baik Persepsi Wajib Pajak (X1) dan Pelaksanaan system Self Assessment (X2) yang diberikan maka semakin meningkat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) Di Kantor Pelayanan Semarang Barat.

#### **Pengujian Hipotesis**

1. Pengujian Hipotesis Persepsi wajib pajak (X1) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)

$H_0 : = 0$  artinya tidak ada hubungan positif yang signifikan antara Persepsi wajib pajak (X1) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)

$H_a : > 0$  artinya ada hubungan positif yang signifikan antara Persepsi wajib pajak (X1) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)

Kreteria Pengujian

1. Taraf uji signifikan = 0,05
2. Dengan d.f = n - 2

3. Nilai t tabel menunjukkan 1,658

4. Perhitungan t hitung

$$t = \frac{0,987 (100-2)}{(1 - (0,987)^2)}$$

$$t = 59,71$$

signifikan antara Persepsi Wajib Pajak (X1) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) pada taraf uji signifikan 0,05. Artinya semakin baik Persepsi Wajib Pajak (X1) maka semakin meningkat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengujian Hipotesis Pelaksanaan Sistem Self Assessment (X2) Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)

Ho : = 0, artinya tidak ada hubungan positif yang signifikan antara Pelaksanaan system Self Assessment (X2) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)

Ha : > 0, artinya ada hubungan positif yang signifikan antara Pelaksanaan system self assessment (X2) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)

Kreteria Pengujian

1. Taraf uji signifikan = 0,05
2. Dengan d.f = n-2
3. Nilai t Tabel menunjukkan 1,658
4. Perhitungan t hitung :

$$t = \frac{0,976 (50-2)}{(1 - (0,976)^2)}$$

$$t = 44,37$$

Taraf uji signifikan 0,05 artinya semakin baik pelaksanaan system self assessment (X2) yang diberikan maka semakin meningkat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat

3. Pengujian Hipoteses Korelasi Kendall W

Ho : k=0 tidak terdapat korelasi /kesesuaian antara Persepsi Wajib pajak (X1) dan Pelaksanaan system self assessment (x2) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)

Ha : k > 0 terdapat korelasi/kesesuaian antara Persepsi Wajib Pajak (X1) dan Pelaksanaan system Self Assessment (X2) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)

Kreteria Pengujian :

1. Taraf nyata 0,05
2. Dengan d.f = n-1
3. Untuk Nilai tabel menunjukkan

$$\text{Tabel } X^2 (100-1) = 77,929$$

4. Perhitungan  $X^2$  hitung

$$X^2 = k \cdot (N-1) \cdot W$$

$$= 3 \cdot (100-1) \cdot 0,872$$

$$= 258,98$$

Dari hasil perhitungan  $X^2$  hitung lebih besar dari  $X^2$  tabel yaitu sebesar  $258,98 > 77,929$  atau  $\text{sig} (0,000) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan ada hubungan positif yang signifikan antara Persepsi wajib Pajak ( $X_1$ ) dan Pelaksanaan system Self Assessment ( $X_2$ ) dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan ( $Y$ ) pada taraf uji signifikan  $0,05$ .

## Penutup

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada umumnya wajib Pajak menyatakan setuju bahwa pajak merupakan wujud pengabdian dirinya terhadap Negara, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka sebagai warga Negara Indonesia cukup tinggi. Dengan kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang akan menambah kesadaran yang pada akhirnya mereka akan semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada umumnya Wajib Pajak menyatakan setuju bahwa dalam sistem *Self Assessment* memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan kepada Badan Penyelesaian. Pemungutan pajak sesuai dengan tujuan hukum, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan dan memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya, telah memiliki kepastian hukum yang pada akhirnya mereka akan semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada umumnya Wajib Pajak sangat patuh, dimana wajib Pajak sangat setuju bahwa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus sesuai dengan kenyataan yang ada dan diisi berdasarkan buku petunjuk pengisian SPT, Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, melalui system pemungutan pajak *Self Assessment* sehingga diharapkan Wajib Pajak menjadi loyal dan tidak sering mengajukan keluhan berkenaan dengan pemberian pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. Terdapat hubungan yang positif antara Persepsi Wajib Pajak ( $X_1$ ) dengan tingkat Kepatuhan wajib Pajak Perseorangan ( $Y$ ), yang ditunjukkan oleh nilai koefisien  $r$  sebesar  $0,987$  dan  $t$  hitung ( $59,71$ )  $> t$  tabel ( $1,658$ ) atau  $\text{sig} (0,000) < 0,05$  yang berarti hubungan antara Persepsi Wajib Pajak ( $X_1$ ) dengan tingkat kepatuhan wajib Pajak Perseorangan ( $Y$ ) signifikan / nyata. Terdapat hubungan yang positif antara Pelaksanaan *Self Assessment* ( $X_2$ ) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan ( $Y$ ) yang ditunjukkan oleh nilai  $r$  sebesar  $0,976$  dan  $t$  hitung ( $44,37$ )  $> t$  tabel ( $1,658$ ) atau  $\text{sig} (0,000) < 0,05$  yang berarti hubungan antara pelaksanaan sistem *self assessment* ( $X_2$ ) dengan tingkat kepatuhan Wajib pajak Perseorangan ( $Y$ ) signifikan / nyata

1. Terdapat hubungan yang positif dengan keeratan hubungan yang sangat kuat antara Persepsi Wajib Pajak ( $X_1$ ) dan Pelaksanaan system Self Assessment ( $X_2$ ) dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan ( $Y$ ), hal ini dibuktikan  $W$  sebesar  $0,872$  dan  $X^2$  hitung ( $258,98$ )  $> X^2$  tabel ( $77,929$ ) atau  $\text{sig} (0,000) < 0,05$  yang berarti hubungan antara Persepsi wajib Pajak Perseorangan ( $X_1$ ) dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* ( $X_2$ ) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan ( $Y$ ) signifikan / nyata

### Saran

1. Mengingat adanya sebagian kecil responden yang menyatakan kurang setuju dalam system Self Assessment memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, maka hendaknya Wajib Pajak diberikan kebebasan yang optimal untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

2. Mengingat adanya sebagian kecil responden yang menyatakan kurang setuju dalam pelaksanaan system Self Assessment memberikan kepastian hukum bagi wajib Pajak maka diharapkan pemerintah untuk dapat menyempurnakan system peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum yang lebih baik.
3. Mengingat adanya sebagian kecil responden yang menyatakan kurang setuju dalam tata cara pengisian SPT dan kewajiban formal lainnya maka diharapkan adanya penyempurnaan sistem *Self Assessment* yang lebih sederhana dan mudah bagi Wajib pajak tanpa harus melanggar Undang-Undang Perpajakan baik secara material maupun administrasi

### **Daftar Pustaka**

- Burhan Nurgiyantoro, 2000 Statistik Terapan, Gadjah Mada University Press Yogyakarta
- Husein Umar, 1999, Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam Pemasaran, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Judisseno, Rimsky K 1997, Pajak dan Strategi Bisnis Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Mardiasmo, 2001 Perpajakan Edisi Revisi, 2003 Andi Offset Yogyakarta
- Marzuki, 1995 Metodologi Riset Cetakan ke 6 BPFE Yogyakarta
- Muhammad Zin, 2003 Manajemen Perpajakan, Salemba Empat Jakarta
- Mukhtar M. Ali, H Wayne Cecil & James A Knoblett 2004, Efek Tarif Pajak dan Penegakan pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Jurnal Penelitian Jakarta
- Rahnat Jalaludin, 1996 Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi Remaja Rosdakarya Offset Bandung
- Safri Nurmantu, 2003 Pengantar Perpajakan, Edisi 2 Gramit Jakarta
- Samsubar Saleh 1996, Statistik Non Parametrik BPFE Yogyakarta
- Singarimbun Masri, Sofian Effendi 1995, Metodologi Penelitian Survei, LP3ES Jakarta
- Sudarsono, 1999, Perpajakan Alfabeta Bandung
- Sudjana, 1997 Statistika Untuk Ekonomi dan Niaga Edisi Ketiga Tarsito Bandung
- Suharsimi Arikunto, 1997, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rineka Cipta Jakarta
- Sutrisno Hadi, 1998, Metodologi Research, Yayasan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta

Undang-Undang Perpajakan Tahun 2009 Citra Umbara Bandung

Walgito, Bimo 1997 Pengantar Psikologi Umum Andi Offset Yogyakarta

Waluyo, Wirawan 1999, Perpajakan Indonesia Cetakan Pertama Salemba Empat Jakarta

Winarno Surakhmad, 1990, Metodologi Penelitian BPFE Yogyakarta

Wirawan, Richard Burton, 2001 Perpajakan Indonesia Cetakan Pertama salemba Empat